

## **Penerapan Pengawasan Terhadap Penerapan Aplikasi SIPD Di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan**

**Author:**

**Rezki Zairullah Amroni<sup>1</sup>, Taufan<sup>2</sup>**

**Afiliasi:**

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan<sup>1</sup>, Universitas Muslim Indonesia

**Email:**

[rezkizairullahamroni16@gmail.com](mailto:rezkizairullahamroni16@gmail.com)<sup>1</sup>, [taufan.alwany05@gmail.com](mailto:taufan.alwany05@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menggantikan sistem sebelumnya, SIMDA guna menciptakan sistem informasi yang efisien, efektif, akurat, transparan, dan akuntabel, menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akurasi dan kelengkapan informasi adalah kunci peningkatan kapabilitas pelayanan pemerintah, sehingga diperlukan sistem informasi yang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode kualitatif. Teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III digunakan sebagai kerangka, yang menekankan empat variabel penting untuk keberhasilan kebijakan: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap atau Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informan yang diambil berdasarkan Purposive Sampling dari pegawai Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Proses komunikasi telah diterapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan karena banyaknya pemberitahuan informasi melalui berbagai media yang memiliki dedikasi, konsistensi dan komitmen. Sumber daya yang dimiliki sudah cukup memadai guna menunjang pengaplikasian SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Disposisi dalam hal ini sikap dan tingkah laku unjuk kerja para pelaksana masih tergolong rendah. Struktur Organisasi pelaksana SIPD merupakan Tim Pengelola SIPD, tetapi karena tidak memiliki komitmen para pimpinan yang dampak besar penerapan SIPD.

Kata Kunci: SIPD, implementasi, Pengawasan Pemerintahan

### **Abstract**

*The Ministry of Home Affairs has developed a Regional Government Information System (SIPD) to replace the previous system, SIMDA, to create an efficient, effective, accurate, transparent and accountable information system, connecting the central government with regional governments. Accuracy and completeness of information is the key to increasing government service capabilities, so a supporting information system is needed. This research aims to analyze the implementation of SIPD in the South Sulawesi Province Trade Service using qualitative methods. George C. Edward III's theory of policy implementation is used as a framework, which emphasizes four important variables for policy success: Communication, Resources, Attitudes or Dispositions, and Bureaucratic Structure. This research used qualitative methods; informants were taken based on Purposive Sampling from employees of the South Sulawesi Province Trade Service. The research results show that the communication process has been implemented by the South Sulawesi Province Trade Service because of the large number of information notifications through various media that have dedication, consistency and commitment. The resources*

*available are sufficient to support the implementation of SIPD at the South Sulawesi Provincial Trade Service. Disposition, in this case, the attitude and performance behavior of the implementers is still relatively low. The organizational structure implementing SIPD is the SIPD Management Team, but because it does not have the commitment of leaders, this has a big impact on the implementation of SIPD.*

*Keywords: Local Government Information System (SIPD), Government Supervision*

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan sebuah pembangunan pemerintahan di segala wilayah sebagai jalan memberikan petunjuk secara real dan melibatkan semua warga secara serentak dengan memperuntukkan kaidah informasi berlandaskan digital menjadi target penyelenggaraan pemerintahan negara saat ini dan masa depan (Bekti, 2015). Pemerintah fokus menggunakan digital untuk membangun pemerintahan menjadi lebih baik dan maju. Digital salah satu jalan yang dipilih dan perlu diterapkan dalam segala bidang dalam pemerintahan untuk mempermudah dalam proses pelayanan masyarakat.

Dalam rangka mengerjakan pertanggungjawaban metode Perencanaan beserta Anggaran, penerapan teknologi adalah tanggungan yang harus diterapkan oleh kekuasaan tertinggi negara (Balqis & Fadhly, 2021). Untuk menerapkan teknologi digital dalam pemerintahan dibutuhkan sebuah perencanaan dan anggaran. Pemerintah perlu membuat sebuah anggaran khusus mengenai program ini untuk mewujudkannya agar dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah menetapkan sebuah peraturan tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 yang telah mengalih tugaskan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 perihal mengenai tata cara kelola keuangan daerah. Peraturan ini dibuat oleh Menteri Dalam Negeri agar dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan oleh pemerintah dalam hal mengelola keuangan terutama lingkup daerah. Dengan ini, pemerintah hanya perlu menjalankan pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing sesuai dengan Permendagri yang telah dibuat.

Dan seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Selatan terhitung Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak memakai aplikasi SIMDA lagi, namun berakhir memperuntukkan aplikasi SIPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang tata cara dan teknis pengelolaan keuangan daerah. SIPD berdasarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah pengaplikasian informasi keuangan daerah, informasi pembangunan daerah, dan informasi pemerintahan

daerah lainnya yang saling berkaitan untuk digunakan dalam pelaksanaan pengembangan daerah.

Terkait dalam pengembangan daerah, pemerintah kini menggunakan sebuah teknologi yang memudahkan dalam mendapatkan segala informasi apa saja yang dapat membantu dalam pelaksanaan pengembangan daerah yaitu SIPD. Dengan adanya SIPD ini, pemerintah dapat melaksanakan pengembangan daerah dengan baik dan tepat.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 yang menjelaskan SIPD, ruang lingkup dalam SIPD terdiri atas yaitu : a) Informasi keuangan Daerah; b) Informasi Pembangunan Daerah; dan c) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa dalam SIPD dijelaskan bahwa : 1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi informasi Pemerintahan Daerah yang mengandung Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pembangunan Daerah. 2) Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD.

Maupun bentuk informasi dalam pemerintahan yang ada semuanya dikelola atau diolah oleh SIPD. SIPD digunakan dan kesiapan atau fasilitas pemerintah daerah dalam mempersiapkan fasilitas untuk keberlangsungan pemerintah daerah. Untuk memperoleh data mengenai pemerintah daerah dalam pemerataan reformasi di daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjalankan dan mengembangkan rancangan E-Government untuk meringankan penyusunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta memantau perkembangan antar pejabat pemerintah (Sudianing, Ni Ketut; Seputra, 2019).

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengembangkan sebuah teknologi digital yang berguna untuk membantu penyusunan sistem atau kebijakan informasi yang ada pada pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Rancangan teknologi yang dibuat oleh pemerintah yaitu E-Government yang berbasis digital.

Sistem informasi daerah sangat diperlukam atas peraih atau informasi pemerintah daerah butuhkam resolusi pemerintahan daerah (Perencanaan et al., 2020). SIPD merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam meraih sistem informasi yang diberikan sistem informasi Namun, SIPD dibutuhkan anggaran atau dana dari pemerintah untuk diterapkan nantinya. Selain itu, masih banyak yang belum tahu tentang SIPD atau masih asing bagi beberapa pegawai pemerintahan mengenai penggunaannya.

Penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk mendeteksi keefektifan pelaksanaan SIPD dalam menyerahkan data secara efisien, efektif, akurat, transparan, dan konkret dengan untuk memperuntukan informasi yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah. Namun, setelah dilakukan survei awal di lokasi pemeriksaan

memperlihatkan masih ada tersedia sejumlah hambatan dalam menggunakan SIPD yang terdapat terutama dengan masih kurangnya pengetahuan dan penguasaan pengurus dalam mengerjakan penginputan masukan. Hal ini disebabkan, karena perancangan dalam penerapan sistem informasi tersebut tidak diajarkan dengan secara langsung. Untuk menguasai atas informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk atas informasi yang sangat dibutuhkan penyampaian informssinya.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019, diharapkan percepatan implementasi SIPD akan memungkinkan pemerintah daerah untuk secara instan dalam menyatukan seluruh sistem dengan data pembinaan dan keuangan daerah di SIPD. SIPD menjadi salah satu terobosan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pengembangan daerah. Teknologi ini berbasis digital sehingga mudah digunakan untuk menyimpan informasi tentang tata kelola keuangan daerah, pembangunan daerah dan pemerintahan daerah lainnya.

Ini adalah bagian penting dari kontrol untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya SIPD ini pemerintah dapat dengan cepat mendapatkan dan mengumpulkan sebuah informasi baik itu informasi mengenai perencanaan dan penganggaran, informasi tentang tata kelola keuangan daerah, informasi pembangunan daerah dan informasi pemerintahan daerah. Berkaitan dengan permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh penulis. Penulis akan melaksanakan sebuah penelitian pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan SIPD dengan judul yaitu Pengawasan Terhadap Penerapan SIPD yang berlokasi di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengangkatan tema "Pengawasan Terhadap Penerapan SIPD" dalam artikel jurnal adalah sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan SIPD, tetapi juga akan mengidentifikasi hambatan dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem ini. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Indonesia. Pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan SIPD penting untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga berguna untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan menemukan cara untuk mengatasinya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

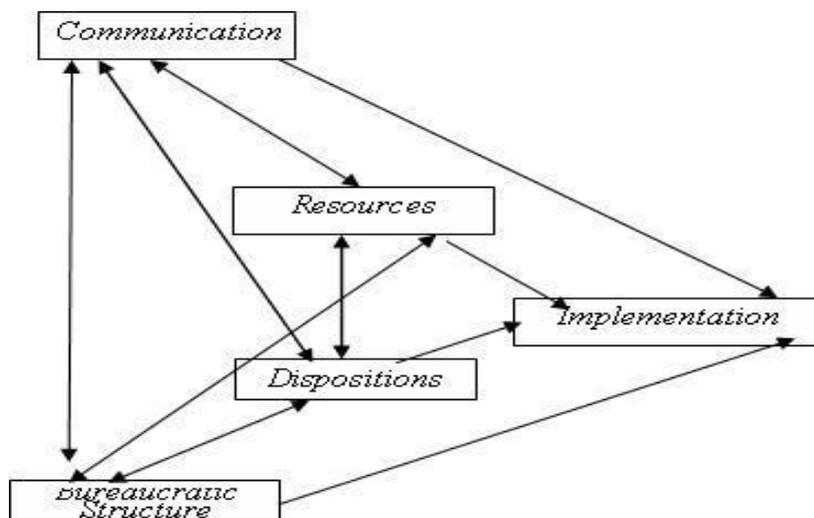
Penelitian ini memperuntukan sistem kualitatif. Metode ini. Sale, et al. (2002) menyempailan atas informasi pada hasil pemelitan kenyataan yang ada. Lebih lanjutnya, Kasinath (2013) menjelaskan ada tiga sasaran yang diperuntukkan untuk metode kualitatif, yaitu (a) sebuah pandangan peneliti atas kejadian di dunia (a researcher's view of the world), (b) jenis dari pertanyaan penelitian (nature of the research question), dan (c) alasan praktis yang berhubungan dengan sifat metode penelitian kualitatif (practical reasons associated with the nature of qualitative methods).

Sebagai salah satu narasumber kepala dinas perdagangan dalam bidang Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Kasubbag Keuangan serta pegawai di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang diambil berdasarkan Purposive Sampling sebagai seumpama responden bagian dalam melaksanakan penentuan. Selain itu juga yang berperan responden yaitu para manajer atau staff yang mengurus SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemelitan pada objek ini atas peraih dan peenyampaian data yang disampaikan (Putri, 2021). Pengumpulan data dilakukan di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik utama pengumpulan data adalah melalui wawancara dan observasi. Adapun instrument lain yang digunakan adalah dokumentasi. Dalam proses penarikan data sendiri berdasarkan dari hasil petunjuk dengan atas informasi yang diberikan. (Wisler, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Terhadap Penerapan Aplikasi SIPD Di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan**

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan (George C. Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan adalah kiat yang penting karena efisiensi sealiran jasa jika jika tidak dikelola dan direncanakan secara baik penerapannya maka tidak akan dapat mewujudkan kebijakan publik yang baik. George C. Edward mengutarakan bahwa terdapat empat penyebab penting yang berkedudukan kepada merengkuh bahwa mencapai suatu kebijakan yang baik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Recources), Sikap atau Disposisi (Dispositions atau Attitudes) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure).



Sumber: George III Edward : implemeting public policy, 1980

Gambar 1

Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Penerapan Kebijakan Publik

### 1) Komunikasi (communications)

Suatu masukan dapat diketahui oleh para penyusun kebijakan apabila antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan terdapat hubungan yang baik, maka ini akan terjalin dengan baik dan pengimplementasiannya akan efektif terlaksana. Ada sejumlah penanda yang bisa digunakan guna merengkuh keberhasilan penyebab persinggungan, diantaranya:

- 1) Transmisi yaitu adanya pemindahan atau desimasi komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan baik apabila hal ini dijalankan dengan baik maka komunikasi terjadi juga dengan baik. Hal lain yang juga memberikan hambatan yaitu banyaknya generasi birokrasi dalam proses komunikasi menjadi penyebab terjadinya miskomunikasi, sehingga sasaran yang dicapai terhenti. Banyak birokrasi yang menjadi penyebab sasaran tidak dapat tercapai yang terhenti karena adanya miskomunikasi antara birokrasi satu sama lain.
- 2) Kejelasan yaitu pelaksana kebijakan harus mengikuti persinggungan yang eksplisit dengan pembuat kebijakan. Agar pelaksana kebijakan tidak kebingungan dalam menerapkan kebijakan. Perlu ada kejelasan mengenai kebijakan yang akan dibuat agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
- 3) Konsistensi merupakan pendirian atau ketetapan dengan komunikasi yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang dilaksanakan. Dalam segala hal yang dikerjakan diperlukan adanya konsistensi agar apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik dengan tetap memperhatikan faktor penting lainnya. Apabila sering kali terjadi perubahan perintah dalam pelaksanaan akan

memunculkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu ada namanya konsistensi supaya kebijakan yang sedang sementara dilaksanakan tidak berhenti ditengah jalan.

Komunikasi terkait praktik SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sudah dilakukan menelusuri sosialisasi perihal pemahaman dan pedoman mekanisme praktik SIPD. Namun masih perbanyak pembangunan dikarenakan masih adanya manajer yang perbanyak filsafat teuit praktik teknologi modern. Untuk itu diadakan pelatihan setiap tiga bulan sekali untttuk mempertinggi kesanggupan administrator SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

SIPD adalah suatu pilihan pengamalan SIMDA serupa rupa pembaruan kaidah masukan lebih efisien, membangun, akurat, transparan, dan akuntabel (Riani et al., 2021). Saat ini semenjak SIPD dilaksanakan, semua aplikasi pengelolaan yang dipakai sebelumnya perlu pembaruan bahkan ditinggalkan dan setiap abdi negara mesti dimulai dari awal pada setara database yang ada.

Selain itu Pemerintah mesti memasukkan bahwa sistem informasi bermotif elektronik yakni SIPD sangat bermanfaat dalam upaya keuangan serta pengelolaan pemerintah di seluruh daerah, walaupun sebelumnya pemberdayaan ini tampak tersembunyi menjelang diaplikasikan. berasaskan efek pembahasan analisis di lokasi, administrator yang berdinis dalam pengaplikasian SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 30% belum mengerti dalam pengaplikasian SIPD. Hal ini berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap staff Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Terdapatnya SIPD memfasilitasi pengolahan Perencanaan serta Penggunaan anggaran Daerah yang terkesan semakin baik dan efisien sehingga tidak perlu peningkatan Standar Harga Barang (SHB), kita hanya melakukan scan dan klik kodenya saja, kita hanya perlu menginput datanya dan akan diproses secara otomatis oleh sistem. Ini juga bertujuan supaya adanya keterbukaan data. Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada Pemendagri No 70 Tahun 2019. Dalam penyeliaan SIPD terbentuk mulai dari proses perencanaan serta anggaran, pemerintah merancang sistem informasi yang bisa menyederhanakan aksi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menginput perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan hasil riset ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa pada penerapannya administrator sangat tertolong dan menyederhanakan aksi pekerjaan dalam menggunakan sistem ini. Namun, di abdi negara tercantum dalam prosesnya masih tidak memahami mekanisme penerapan pokok masukan secara utuh. Hal ini dikarenakan dominasi yang semata-mata bercorak penggunaan sosialisasi depan setiap instansi tanpa diikuti oleh pedoman-pedoman istimewa tentang mekanisme penerapan SIPD pada pelaksana di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal

tersebut sangat penting dilakukan agar penerapan SIPD dalam bergerak tambah efektif sebagai tujuan dilaksanakannya analisis ini.

## **2) Sumber daya (recources)**

Dalam menjalankan organisasi diperlukan adanya sumber daya sebagai salah satu hal yang penting dalam menjalankan kebijakan. Sumber daya merupakan persyaratan penting untuk implementasi atau organisasi untuk melakukan dengan baik. Edward III menyatakan bahwa sumber daya dapat diukur dari aspek validitas, termasuk keserasian dan kejelasan. "Sumber daya yang tidak mencukupi berarti bahwa hukum tidak berlaku, layanan tidak diberikan, dan peraturan yang baik tidak ada.". Sumber daya sangat berperan penting dalam penerapan SIPD (Balqis et al., 2021).

Beberapa indikator yang menunjukkan pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan adalah:

- 1) staf sendiri sebagai salah kegiatan pendukung dalam hal Untuk mengatasi masalah manifestasi jasa, tidak cukup semata-mata menambah penilaian pekerja. Namun, dibutuhkan juga pegawai atau personel yang kompeten (dengan keterampilan dan kemampuan) di bidangnya.
- 2) informasi yang diberikan sesuai atas data yang diberikan yaitu h: a) Data informasi kepatuhan terhadap jasa regulasi pemerintah. b) Informasi terkait metode manifestasi jasa yang diterapkan. Dua nilai penting tersebut di atas merupakan nilai yang sangat penting dalam gerakan manifestasi jasa. Sebab, berdasarkan nilai-nilai tersebut, informasi indikator jika dilakukan dengan tepat dan akurat.
- 3) Otoritas. Kewenangan atas keseluruhan yang di capai dalam kesepakatan yang di capai sehingga bisa menjadi salah bentuk atas kewenangan administrator bisa dilegitimasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dihalangi atau dibatalkan begitu saja. Namun, kewenangan yang diberikan ini juga dapat disalahartikan bagi pihak yang berkuasa. Ketika para pemimpin atau penegak kebijakan semata-mata bisa menggunakan otoritas ini untuk keuntungan mereka sendiri dan lembaga mereka.
- 4) Fasilitas. Pengaturan ini didefinisikan sebagai pengaturan fisik. Fasilitas ini juga termasuk fasilitas penunjang berupa sarana dan prasarana. Dasar ini juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Penerapan hal yang berlaku atas penerapan yang di jalankan dalam menjalankan sistemnya

Sumber daya sangat penting dalam mengimplementasikan aplikasi SIPD ini. Hal ini sering terjadi karena tidak berhasilnya implementasi sumber daya yang ada, baik yang kurang maupun yang tidak kompeten di bidangnya. Pada awalnya, peneliti menduga bahwa ada hambatan sumber daya yang tersedia. Di dalamnya, pegawai yang

memiliki peran langsung dalam pengendalian penggunaan aplikasi SIPD mengalami ketidakpahaman dalam penggunaan aplikasi SIPD.

Dalam sistem informasi ini diraih atas kesesuaian dalam informasi yang diberikan dan akuntabel. Pelaksana harus menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas. Faktor yang sangat berperan tentunya (Erviana, 2017). Sumber daya manusia, namun, selain sumber daya manusia, faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dikembangkan dalam Sistem Informasi Manajemen (Mukhsin, 2020).

Sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam pencapaian informasi yang diberikan atas kesesuaian informasi yang diberikan sistem informasi daerah (SIPD). Sumber daya salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan SIPD. Dibutuhkan sumber daya baik itu berupa alat dan perlengkapan untuk menggunakan atau menjalankan SIPD maupun manusia atau pegawai di Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan yang nantinya akan menjalankan program SIPD.

### **3) Disposisi (disposition atau attitudes)**

Tindakan pembuat kebijakan juga berperan penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika implementasi kebijakan berjalan sesuai maka pada penerapan dan pelaksanaannya bisa dapat disesuaikan dan tanpa harus fokus pada kepengurusan yang mangkrak dari semestinya agar pada sistem informasi pemerintah daerah bisa maju, dan mengetahui langkah penerapan. Adapun hal yang perlu diperhatikan secara seksama dan teliti agar sistem informasi pemerintahan berjalan yaitu :

- 1) Penunjukan badan administratif (pelaksana kebijakan). Pemilihan dilakukan atas penunjukan dari surat keterangan pengangkatan yang telah diterima dalam atas pemerintah daerah terkait pada sebagai salah satu penunjukan utama dalam proses penunjukan pemerintah terkait. Memang jika mereka yang mengimplementasikan kebijakan ini tidak memenuhi fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan demikian, hal itu akan menimbulkan hambatan dan hambatan yang nyata.
- 2) Intenstif yang diberikan dengan penyusaian hasil data terkait dalam proses sebagai salah satu penunjukan dalam bidang ini sehingga harus di sesuaikan dalam prosedur terkait.
- 3) Implementasi atas penerapan yang diterapkan sesuai atas prosedur yang berlaku sehingga pada prosedur ini bisa dipastikan sebagai sebuah langkah tepat yang sistem.

Komitmen dan sikap kejujuran harus dimiliki oleh para pelaksana sebagai ekspresi dari karakter yang dimiliki para penegak kebijakan dalam menjalankan tanggung jawabnya, karena suatu program dapat berhasil jika para penegak kebijakan memiliki sikap. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, diharapkan pelaksana ini dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Tata letak selama implementasi dapat menciptakan hambatan atau tantangan dalam penerapan sebuah kebijakan dalam OPD.

Hasil Berdasarkan penelitian terkait hambatan Pengawasan implementasi SIPD pada aspek kelangsungan hidup, yang terdiri dari kekuatan akuntabilitas dalam aplikasi SIPD dalam meningkatkan potensinya untuk mengembangkan aplikasi SIPD dan aplikasi SIPD membantu program perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIPD belum sepenuhnya terintegrasi dan bersinergi dengan sistem e-budgeting, karena aplikasi SIPD masih dalam proses pengembangan yang pada akhirnya akan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait dengan Pemerintah Daerah. Aplikasi SIPD masih belum terintegrasi dengan aplikasi penganggaran. Saat inilah tentunya kendala yang perlu dicari kembali pada tahun anggaran yang sudah mulai menggunakan SIPD terkait dengan proses penyusunan anggaran kegiatan.

Disposisi atau sikap pelaksana menentukan efektif atau tidaknya dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, pengangkatan dan penunjukan pelaksana kebijakan membutuhkan orang yang konsisten, berkomitmen, dan penuh dedikasi dalam melaksanakan kebijakan yang telah disahkan guna kepentingan masyarakat.

Beberapa atas ini dipengaruhi dari sistem terkait sehingga proses ini terdapat penghambat prosedur dalam sebuah hal terkait dalam sistem ini sebagai salah satu bentuk untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan para pengelola kebijakan. Insentif adalah suatu pemberian imbalan kepada pelaksana pelayanan yaitu memberikan keuntungan atau hal tertentu (Frans Dione, 2020). Dapat menjadi salah satu peran pendorong untuk dinas perdagangan agar bisa bekerja dengan baik dalam menerapkan sistem informasi pemerintah daerah dengan baik.

#### **4) Struktur birokrasi (bureaucratic structure)**

Dalam penghambat sangat mengganggu sistem kerja dari penerapam pelayanan yang cepat dan efisien terdapat atas 2 faktor dalam mempengaruhi birokrasi yaitu ;

- a) Adanya SOP sebagai salah satu peranan yang mendukung untuk keberlangsungan pada sebuah sistem informasi, untuk SOP diterapkan dengan menyesuaikan hal yang sangat penting bisa menjadi sebuah jalan tempuh dalam meraih sebuah hal. tepat dan efisien dalam menerapkannya

- b) Fragmentasi adalah desentralisasi menciptakan sebuah sudut pandang pendek dalam sebuah pertanggung jawaban ke desentralisasi makna hanya berspekulatif segala dan atas wewenang hanya diatur pada kebijakan desentralisasi Ini adalah hasil dari keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang gagal dan tidak dilaksanakan dengan baik.

Untuk seluruh proses prosedur yang berlaku dengan sebuah sistem terkait dengan (SIPD) Sebagai salah satu bentuk sistem informasi yang diterapkan. Struktur organisasi pada pelaksanaannya sudah ada pada UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang sistem informasi daerah karena dalam serta kebijakan dan penyelenggaraan sudah diatur dan menyesuaikan atas sistem yang berlaku pada sistem informasi daerah.

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan SIPD berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri seperti yang tercantum pada peraturan tersebut di atas yang berisi tata cara awal pelaksanaan SIPD dari pengisian data hingga rapat evaluasi data berdasarkan peninjauan di lapangan apabila diamati kekurangan penerapan sistem informasi adalah kurang melibatkan struktur organisasi yang berperan dalam proses perencanaan keuangan.

Sistem informasi daerah dihubungkan dengan sistem guna agar sistem dapat berjalan dengan sesuai aturan dan menjalankan sistem informasi untuk kepentingan birokrasi daerah. Selain itu, pemerintah pusat perlu melaksanakan atau mengadakan pengarahan melalui kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan khusus kepada staff atau pegawai yang bekerja di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hal seperti ini yang kemudian diharapkan dapat memberikan kemudahan mengenai pembangunan baik itu secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun secara horizontal antar OPD.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Proses komunikasi telah diterapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya pemberitahuan informasi melalui berbagai media yang memiliki dedikasi, konsistensi dan komitmen penuh tentang tugas-tugas yang harus dilakukan dalam menjalankan SIPD. Sumber daya yang dimiliki sudah cukup memadai guna menunjang pengaplikasian SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sumber daya pegawainya sebagai pelaksana belum seimbang antara kualitas dan kuantitas. Jumlah dan kemampuan pelaksana belum cukup memadai seperti masih ditemukan pelaksana yang belum memahami dengan baik sistem informasi. Disposisi dalam hal ini sikap dan tingkah laku unjuk kerja para pelaksana masih tergolong rendah, hal ini diakibatkan

sedikitnya keuangan dan insentif bagi para pelaksana penerapan SIPD yang disediakan di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur Organisasi pelaksana SIPD merupakan Tim Pengelola SIPD, tetapi karena tidak memiliki komitmen para pimpinan akan dampak besar penerapan SIPD serta kurangnya kolaborasi antar pelaksana yang ada di instansi, berdampak pada kerja sama dalam perencanaan pembangunan belum cukup maksimal karena kurang mengikutsertakan struktur birokrasi dalam menjalankan proses perencanaan keuangan. Hasil dari penelitian dengan menggunakan empat variabel tersebut adalah masih ada kendala pada pemahaman pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga perlu diadakan pelatihan tertentu untuk mengintensifkan kapabilitas pelaksana dalam pelaksanaan sistem informasi tersebut.

## **SARAN**

Setelah melakukan penelitian terhadap judul penelitian yang telah ditetapkan. Penulis mengemukakan saran untuk mengembangkan koordinasi serta kolaborasi pembangunan dalam penerapan SIPD terkhususnya pada dinas perdagangan, bahwa Pemerintah harus mengadakan bimbingan teknis kepada pelaksana dan Instansi Pemerintah di daerah guna mendukung pengumpulan informasi terkait pembangunan daerah. Dengan dilaksanakannya bimbingan dan pelatihan tersebut dapat menunjang terlaksananya koordinasi dengan baik. Sehingga untuk mengintensifkan kapabilitas pelaksana dalam pelaksanaan sistem informasi hal tersebut perlu diperhatikan. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi Kepala Daerah tentang manfaat penerapan SIPD sebagai pedoman data pengelolaan pembangunan sehingga memberikan kemudahan pengisian data SIPD. Dibutuhkan anggaran yang digunakan memfasilitasi kegiatan operasional maupun insentif bagi Pelaksana SIPD. Anggaran sudah menjadi hal vital dalam segala pelaksanaan atau penerapan kebijakan dalam organisasi perangkat daerah atau dinas. Pemerintah perlu memberikan efek jera berupa sanksi administrasi bagi para pelaksana implementasi SIPD jika hasil kerja yang dilakukan tidak maksimal dan tingkat pemenuhan informasi tidak memadai. Keseriusan dan tanggung jawab pelaksana sangat diperlukan untuk mendorong hal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apniwansyah, G., Widiantara, I. P., & Pathiassana, M. T. (2022). Upaya mengoptimalkan sistem informasi pemerintah daerah. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(April), 96–108. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4350>
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). *Jurnal Public Policy Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat*. 2(1), 121.

- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Erviana. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kota Palu). *E ijurnal Katalogis*, 5(4), 182–193.
- Frans Dione, U. F. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah (Studi tentang Penerapan SIPD pada BAPPEDA Kota Bengkulu). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(January), 21–28.
- H. Harafani and H. A. Al-kautsar, (2021) “Meningkatkan Kinerja K-Nn Untuk Klasifikasi Kanker,” vol. 18, no. 1.
- Hafid Mukhlisin, Indra Budi, (2017) Analisis Pengukuran Tingkat Kesiapan Penerapan Manajmen Pengetahuan Studi Kasus Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, Universitas Indonesia
- M. Algoritma, C. Untuk, N. Iriadi, and N. Nuraeni, “Kajian Penerapan Metode Klasifikasi Data Kelayakan Kredit Pada Bank,” pp. 132–137.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7–15. <https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43>
- N. Eprianti, (2019) “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf),” *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 3, no. 2, doi:10.29313/amwaluna.v3i2.4645.
- Nadiar Ahmad Syaripul, Adam Mukharil Bachtiar, (2016), Visualisasi Data Interaktif Data Terbuka Pemerrintah Provinsi Dki Jakarta Topik Ekonomi Dan Keuangan Daerah *Jurnal Universitas Indonesia*
- Nadya, C., & Wurara, C. (2020). iImplementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–13.
- Putri, R. K. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 1, 1–73. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15354>
- Riani, D., Agung, G., Putri, A., Agus, P., & Pratama, E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 1–12.

- Sakinah Zein, (2015) Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu). Skripsi. Palu: Universitas Tadulako
- Sudianing, Ni Ketut; Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1-22.
- Setyani, W., Sitorus, S. R., & Panuju, D. Y. (2017). Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya di Kota Depok. *Buletin Tanah dan Lahan*, 1 (1), 121-127.
- Sinaga, S. H., Suprayogi, A., & Haniah. (2018). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Metode Normalized Difference Vegetation Index dan Soil Adjusted Vegetation Index Menggunakan Citra Satelit Sentinel-2A. *Jurnal Geodesi Undip*, 7 (1), 202-211.
- Widyastuti dkk., (2004) Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Bali: Simposium Nasional Akuntansi VII Tahun 2004
- Wisler, A. K. (2009). *'Of, By, And For Are Not Merely Prepositions': Teaching And Learning Conflict Resolution For A Democratic, Global Citizenry*. *Intercultural Education*, 20(2), 127-133. <https://doi.org/10.1080/14675980902922143>
- Yulia Paris Kadir., (2017) pengaruh Customer Value Terhadap Kepuasan Konsumen Serta Dampaknya Pada Loyalitas Pelanggan Carefour Di Kota Palu. Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).